

Sidik Firmadi

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Firmadisidik@gmail.com

Titin Purwaningsih

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: titin.p.widodo@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.006>

**Analisis Institusionalisasi Partai Politik
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
(Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi
Lampung)****ABSTRACT**

The institutionalization of a political party is one of the factors that affect the stability of the votes or the number of seats of a political party in the election. In the 2014 legislative election, the votes or the number of seats of the Democrat Party of the Province of Lampung decreased compared to the 2009 legislative election. However, the vote or the number of seats in the 2014 legislative election is still fairly stable when compared with the vote or the number of seats of the Democrat Party in other regions. The stability of the votes or the number of seats of the Democrat Party of the Province of Lampung in the 2014 legislative election is interesting to study to investigate whether the stability is influenced by the factor of the institutionalization of the party or be influenced by other factors such as patronage and clientelism. This research uses descriptive method with qualitative approach. In this study, the researchers also conducted an analysis of the index of institutionalization of political party to determine the level of institutionalization of the Democrat Party of the Province of Lampung. This study takes the research sites in the Province of Lampung with the Democrat Party as the research object. This study concludes that: First, the level of institutionalization of the Democrat Party of the Province of Lampung is in the medium category. Second, the stability of the votes of the Democrat Party of the Province of Lampung is not solely influenced by the institutionalization of the party, but is influenced by two other factors which are more dominant, namely the practice of patronage and clientelism in governor election and legislative election which are carried out simultaneously and the practice of patronage and clientelism performed by the Democrat Party candidates. The recommendation of this study is that the Democrat Party of the Province of Lampung must immediately resolve the flaws in the institutionalization dimension, especially in the number of the power of members or cadres, the number of the networking of mass organization or organizational wing of the party, so that in the future, the potential of the power of the members or cadres and mass organizations or organizational wing of the party can run maximally so the party machinery can operate more effectively during the elections.

Keywords: Institutionalization of the party, Patronage, Political clientelism.

ABSTRAK

Institusionalisasi partai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan perolehan suara atau perolehan kursi partai politik dalam pemilu. Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pemilu legislatif tahun 2014 mengalami penurunan perolehan suara atau perolehan kursi jika dibandingkan pada pemilu legislatif tahun 2009, namun perolehan suara atau perolehan kursi pada pemilu legislatif tahun 2014 tersebut masih cukup stabil jika dibandingkan dengan perolehan suara atau perolehan kursi Partai Demokrat di daerah lain. Kestabilan perolehan suara atau perolehan kursi Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pemilu legislatif tahun 2014 menarik untuk diteliti, karena untuk mengetahui apakah kestabilan tersebut dipengaruhi oleh faktor institusionalisasi partai atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti patronase dan klientelisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini peneliti juga melakukan analisis indeks institusionalisasi partai untuk mengetahui tingkat institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Provinsi Lampung dengan obyek penelitian Partai Demokrat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, tingkat institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung berada dalam kategori sedang. Kedua, kestabilan perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak semata-mata dipengaruhi oleh institusionalisasi partai, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor lain yang lebih dominan yaitu praktek patronase dan klientelisme dalam pilgub dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan dan praktek patronase dan klientelisme yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat.

Rekomendasi penelitian ini adalah Partai Demokrat Provinsi Lampung haruslah segera memperbaiki berbagai kekurangan dalam dimensi Institusionalisasi, terutama jumlah kekuatan anggota atau kader, jumlah jaringan ormas atau organisasi sayap partai, sehingga kedepan potensi dari kekuatan anggota atau kader dan ormas atau organisasi sayap partai, dapat berjalan maksimal sehingga mesin partai dapat berjalan lebih efektif pada saat pemilu.

Kata kunci: Institusionalisasi Partai, Patronase, Klientelisme Politik.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun menjelang pemilihan legislatif tahun 2014 citra Partai Demokrat sangatlah buruk dimata masyarakat, yang disebabkan olehbanyaknya elit Partai Demokrat yang melakukan korupsi seperti M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 berhasil memperoleh suara sebesar 11,81% atau 11 kursi DPRD di Provinsi Lampung dan menempati posisi kedua perolehan kursi terbanyak, meskipun jika dibandingkan tahun 2009 perolehan kursi partai turun sebanyak 3 kursi. Merosotnya perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Lampung, tidaklah terlalu buruk jika dibandingkan dengan perolehan kursi Partai Demokrat di daerah lain, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Daftar Penurunan Perolehan Kursi DPRD Partai Demokrat

No	Provinsi	Perolehan Kursi 2009/Status	Perolehan Kursi 2014/Status	Presentase Penurunan
1.	Lampung	14 Kursi/Pemenang	11 Kursi/Peringkat Kedua	21,43%
2.	Jawa Timur	22 Kursi/Pemenang	13 Kursi/Peringkat Empat	40%
3.	Jawa Tengah	16 Kursi/Peringkat Kedua	9 Kursi/Peringkat Enam	43,75%
4.	Jawa Barat	28 Kursi/Pemenang	12 Kursi/Peringkat Empat	57,14%
5.	DKI Jakarta	32 Kursi/Pemenang	10 Kursi/Peringkat Lima	68,75%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung cukup stabil dalam pemilu legislatif tahun 2014, kestabilan dalam memperoleh suara atau kursi DPRD merupakan salah satu indikator dari institusionalisasi partai, berdasarkan fenomena tersebut maka akan sangat menarik jika dilakukan penelitian terkait dengan “*Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung)*” dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung? 2). Apakah perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor institusionalisasi partai atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti patronase dan klientelisme?

KERANGKA TEORI

1. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:403-404).

2. Institusionalisasi Partai

Tabel I.3
Indikator Institusionalisasi Partai Politik

Dimensi	No.	Kriteria	Indikator	Coding
Roots in society	1.	Umur partai dibanding umur kemerdekaan	Prosentase dari umur partai dibanding umur negara	0 =< 50 % 1 = 50% - 90 % 2 => 90 %

	2.	Umur partai dibanding era multi partai	Prosentase umur partai dibanding umur reformasi (era multi partai)	0 =< 50 % 1 = 50% - 90 % 2 => 90 %
	3.	Kestabilan dukungan pemilu	Prosentase perolehan suara dalam pemilu terakhir dibanding pemilu sebelumnya	Kekalahan: -1 = < 50 % 0 = 10% - 50 % 2 =< 10 % Kemenangan: 0 = < 10 % 1 = 10 – 50 % 2 = > 50 %
	4.	Jaringan ormas	Jumlah jaringan ormas	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak terorganisir 2 = ada dan terorganisir
Autonomy	1.	Pergantian pimpinan partai	Jumlah pergantian pimpinan partai	0 = tidak ada 1 =1 2 => 2
	2.	Kestabilan dukungan politik pasca pergantian pimpinan partai	Prosentase perolehan suara setelah pergantian dibanding sebelumnya	Kekalahan: -1 = < 50 % 0 = 10% - 50 % 2 = < 10 % Kemenangan: 0 = < 10 % 1 = 10 – 50 % 2 = > 50 %
	3.	Otonomi pengambilan keputusan	Ketergantungan partai pada figur personal dalam pengambilan keputusan (dari data kualitatif)	0 = tergantung figur sepenuhnya 1 = tergantung dalam hal tertentu 2 = tidak tergantung figur
	4.	Apresiasi dari pihak tertentu	Apresiasi yang diberikan oleh organisasi diluar partai berupa dukungan politik (secara kualitatif)	0 = tidak ada apresiasi 1 = sedikit apresiasi 2 = banyak mendapat apresiasi
Level of organization	1.	Kekuatan anggota	Jumlah yang mempunyai kartu anggota dibanding perolehan suara	0 =< 10 % 1 = 10 – 50 % 2 = > 50 %
	2.	Keteraturan kongres	Jadwal kongres	0 = tidak ada, tidak terjadwal 1 = ada bila ada permasalahan 2 = ada secara teratur

	3.	Sumber daya personal dan material	Jumlah sumber daya (manusia, peralatan kantor, dana).	0 = sedikit (kurang) 1 = cukup 2 = banyak (berlimpah)
	4.	Koordinasi dan pertemuan partai tingkat nasional	Tingkat koordinasi dengan partai secara nasional	0 = sangat jarang 1 = kadang-kadang 2 = sering, terjadwal
Coheren ce	1.	Koherensi di parlemen	Jumlah anggota parlemen yang mundur karena konflik	0 = > 2 orang 1 = 1 orang 2 = tidak ada
	2.	Kekompakan partai	Jumlah faksi dalam partai dan kekompakan	0 = terpecah 1 = ada faksi, tidak terpecah 2 = tidak ada faksi
	3.	Toleransi dalam partai	Tingkat konflik dalam partai	0 = ada pengusiran 1 = ada ancaman 2 = kebebasan berekspresi

Sumber: Basedau dan Stroh (2008).

3. Patronase dan Klientelisme Politik

Kestabilan perolehan suara partai politik pada saat pemilu tidak hanya dipengaruhi faktor institusionalisasi partai, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah patronase dan klientelisme dalam pemilu. Patronase politik adalah pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respons balik yang akan diberikan oleh pemilih (Aspinall & Sukmajati 2015:22).

Patronase politik dalam pemilu menurut Aspinall dan Sukmajati memiliki lima model yaitu: Pertama adalah pembelian suara (*vote buying*) yang bermakna, distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih. Patronase kedua dalam

pemilu adalah pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), contoh barang pemberian seperti bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Patronase politik ketiga dalam pemilu adalah pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), contohnya adalah penyelenggaraan pertandingan olah raga, turnamen catur atau domino, forum-forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan lain sebagainya. Patronase politik keempat dalam pemilu adalah pemberian barang-barang kelompok (*club goods*), yang berarti pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Patronase politik kelima dalam pemilu adalah proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*), yang berarti proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. (Aspinall & Sukmajati 2015:24-28).

Patronase politik akan berjalan efektif apabila dengan membentuk relasi yang murni klientelistik, dengan demikian relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek (*one-off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian pembentukan relasi jangka panjang yang sama-sama menguntungkan dua pihak, pengulangan seperti ini adalah ciri penting dari klientelisme. Para kandidat biasanya memberikan penghargaan kepada para anggota tim sukses, tidak hanya dengan membayar uang, tetapi

juga dengan janji untuk memberikan pekerjaan, kontrak, atau keuntungan lainnya (Aspinall & Sukmajati 2015:35).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2011:4). Wawancara menurut Stewart dan Cash diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalannya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi (Herdiansyah, 2010:118). Dokumentasi Menurut Herdiansyah adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2010:143).

Penelitian ini menggunakan *coding* dengan skala 0 sampai dengan 2, setiap nilai dari indikator institusionalisasi partai selanjutnya akan dihitung untuk mendapatkan nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Hasil penghitungan nilai indikator dari setiap dimensi institusionalisasi partai selanjutnya akan dikategorikan dengan nilai interval indeks yaitu 0 - 0,66 (rendah), 0,67 - 1,33 (sedang), dan 1,34 - 2,00 (tinggi), sehingga dapat diketahui berapa tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Tingkat

institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles Dan Huberman yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*). (Lisa, Ridvia. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman. Padang. Universitas Negeri Padang).

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Partai Demokrat Provinsi Lampung resmi berdiri dan dideklarasikan pada tanggal 9 september tahun 2003, masuknya Partai Demokrat di Provinsi Lampung tidak terlepas dari upaya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk memperluas jaringan serta memenuhi persyaratan guna mengikuti pemilu pada tahun 2004. Partai Demokrat Provinsi Lampung Saat ini, diketuai oleh M. Ridho Ficardo hingga tahun 2015. Pelantikan Ridho Ficardo sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung didasarkan pada SK Pelantikan No.14/SK/DPP.PD/XI/2010. DPD Partai Demokrat Lampung periode 2010 hingga 2015 dalam struktur organisasinya memiliki pimpinan partai (ketua), 10 divisi, dan 32 bidang, dengan total jumlah pengurus 93 orang.

1.

nalisis Tingkat Institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung

Tabel I.4
 Indeks Institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung

No	Dimensi	Indikator	Nilai	Indeks
1	Roots in society	Umur partai dibanding umur kemerdekaan	0	0,75 (sedang)
		Umur partai dibanding umur reformasi (era multi partai)	1	
		Perolehan suara pemilu terakhir dibanding pemilu sebelumnya	0	
		Jumlah jaringan ormas	2	
2	Autonomy	Jumlah pergantian pimpinan partai	0	0,75 (sedang)
		Prosentase perolehan suara setelah pergantian pimpinan partai dibanding sebelumnya	2	
		Ketergantungan partai terhadap figur personal	1	
		Apresiasi yang diberikan oleh organisasi diluar partai	0	
3	Level of Organization	Kekuatan anggota	0	1,25 (sedang)
		Keteraturan kongres	2	
		Sumber daya personal dan material	1	
		Koordinasi dan pertemuan partai tingkat nasional	2	
4	Coherence	Jumlah anggota parlemen yang mundur karena konflik	2	2 (tinggi)
		Jumlah faksi dalam partai dan kekompakan	2	
		Tingkat konflik dalam partai	2	
Indeks Institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung				1,19 (sedang)

Sumber: Diolah Dari Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penghitungan untuk semua dimensi dari institusionalisasi partai di atas menunjukkan hasil bahwa, tingkat institusionalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung berada dalam kategori sedang dengan nilai 1,19, hal itu didasarkan pada nilai yang telah dihitung dari seluruh nilai yang didapatkan pada masing-masing dimensi dari institusionalisasi partai. Jika dianalisis lebih jauh setiap masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

a. Dimensi *Roots in society*

- 1). Umur partai dibanding umur kemerdekaan: DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung berumur 12 tahun, sedangkan negara Indonesia telah berumur 70 tahun. Indikator ini mendapatkan nilai 0, nilai itu didapatkan dari hasil yang telah dihitung oleh peneliti bahwa umur DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung adalah 17,14% dari umur kemerdekaan.
 - 2). Umur partai dibanding era multi partai: DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung berumur 12 tahun, sedangkan umur reformasi (era multi partai) adalah 17 tahun. Indikator ini mendapatkan nilai 1, nilai itu didapatkan dari hasil yang telah dihitung oleh peneliti bahwa umur DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung adalah 70,59% dari umur reformasi (era multi partai).
 - 3). Kestabilan dukungan dalam pemilu: Berdasarkan data dari KPUD Provinsi Lampung, DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung mengalami penurunan perolehan suara pada pileg tahun 2014
-

dibandingkan dengan perolehan suara pada pileg tahun 2009 yaitu sebesar 171.225 suara atau 6,71%. Indikator ini mendapatkan nilai 0, nilai itu didapatkan dari penilaian bahwa perolehan suara masuk dalam kategori minus.

- 4). Jaringan dengan ormas: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung memiliki organisasi sayap yaitu Pemuda Demokrat dan Perempuan Demokrat. Indikator ini mendapatkan nilai 2.

Untuk mengetahui nilai dari dimensi *roots in society*, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *roots in society* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 0,75 (sedang).

b. Dimensi *autonomy*

- 1). Pergantian pimpinan partai: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung telah melakukan pergantian pimpinan partai sebanyak tujuh kali. Indikator ini mendapatkan nilai 0, karena tidak sesuai perodesasi (5tahun) yang telah diatur dalam AD/ART partai.
 - 2). Kestabilan dukungan politik pasca pergantian pimpinan partai: Berdasarkan data dari KPUD Provinsi Lampung terjadi penurunan perolehan suara sebesar 171.225 atau sebesar 6,71%,
-

indikator ini mendapatkan nilai 2, nilai itu didapatkan dari penilaian bahwa penurunan suara tidak mencapai 10%.

- 3). Otonomi pengambilan keputusan: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tergantung pada ketua DPD hanya saat-saat tertentu saja. Indikator ini mendapatkan nilai 1.
- 4). Apresiasi dari pihak tertentu: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak mendapatkan apresiasi berupa dukungan politik dari pihak diluar partai. Indikator ini mendapatkan nilai 0.

Untuk mengetahui nilai dari dimensi *autonomy*, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *autonomy* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 0,75 (sedang).

c. Dimensi *level of organization*

- 1). Kekuatan Anggota: Hasil wawancara dengan Bapak Holidi (ketua BURT DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung memiliki jumlah anggota/kader sebanyak 25.500 orang. Jika dibandingkan dengan perolehan suara pada pileg tahun 2014 sebesar 484.152 atau 11,81%, indikator ini mendapatkan nilai 0. Nilai itu didapatkan dari
-

perbandingan bahwa jumlah anggota/kader partai tidak mencapai 10% dari jumlah perolehan suara.

- 2). Keteraturan kongres: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung memiliki jadwal Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam lima tahun. Indikator ini mendapatkan nilai 2.
- 3). Sumber daya personal dan material: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung telah memiliki sumber daya personal maupun material yang cukup dan memadai. Indikator ini mendapatkan nilai 1.
- 4). Tingkat koordinasi dengan partai secara nasional: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung telah melaksanakan koordinasi ditingkat daerah sesuai dengan peraturan partai. Indikator ini mendapatkan nilai 2.

Untuk mengetahui nilai dari dimensi *level of organization*, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *level of organization* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 1,25 (sedang).

d. Dimensi *coherence*

- 1). Koherensi di parlemen: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa tidak pernah ada anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat yang mundur. Indikator ini mendapatkan nilai 2.
- 2). Kekompakan partai: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa memang terjadi faksi-faksi antar anggota/kader partai terutama pada saat pemilihan pimpinan partai, tetapi faksi-faksi tersebut kemudian dapat dipersatukan lagi setelah pemilihan selesai. Indikator ini mendapatkan nilai 2.
- 3). Toleransi dalam partai: Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung membebaskan setiap anggota/kadernya untuk berpendapat. Indikator ini mendapatkan nilai 2.

Untuk mengetahui nilai dari dimensi *coherence*, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *coherence* termasuk dalam kategori tinggi dengan perolehan nilai sebesar 2 (tinggi). Nilai untuk setiap dimensi dari institusionalisasi partai di atas selanjutnya akan dihitung serta dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai dimensi dibagi dengan jumlah kategori

dimensi. Hasil penghitungan dari seluruh nilai dimensi, didapatkan hasil bahwa tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung berada dalam kategori sedang dengan nilai 1,19 (sedang).

2.

**Analisis Perolehan Suara Partai Demokrat Provinsi Lampung
Pada Pileg Tahun 2014**

Hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) dengan pemilihan legislatif (pileg) yang bersamaan telah memberikan keuntungan tersendiri bagi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Keuntungan yang dimaksud adalah pelaksanaan kampanye pilgub dengan kampanye pileg dapat berjalan bersamaan atau beriringan, sehingga pada saat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Ridho-Bachtiar) melakukan kampanye pilgub secara tidak langsung mereka juga telah mengkampanyekan Partai Demokrat dalam pileg. Relawan atau tim sukses pasangan Ridho-Bachtiar seperti (pariti, *the young inspiration group*, *zigers organizer* dan Posko Garuda) yang berasal dari luar partai secara tidak langsung turut serta mengkampanyekan Partai Demokrat dalam pileg, karena calon gubernur yang mereka dukung adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, jika seandainya pelaksanaan pilgub dengan pileg tidak dilaksanakan secara bersamaan maka DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak akan mendapat tambahan dukungan dari pihak diluar partai dalam melakukan kampanye.

Pasangan Ridho-Bachtiar pada saat pemilihan gubernur yang lalu membentuk PARITI (paguyuban ridho berbakti), PARITI sendiri

bergerak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat kesukuan seperti menonton wayangan (menyasar kelompok Jawa), serta kegiatan seni budaya lainnya yang bermaksud untuk menjaring massa tingkat kelas menengah kebawah dan pedesaan, selain itu PARITI juga memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat, beberapa kegiatan yang dilakukan PARITI tersebut berhasil menarik simpati masyarakat karena kegiatan hiburan maupun bantuan yang mereka berikan berhasil menghibur masyarakat karena sesuai dengan identitas dari kesukuan serta kebutuhan masyarakat setempat. Perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 sebesar 484.152 suara atau 11,81 %, sedangkan kursi yang didapatkan Partai Demokrat Provinsi Lampung adalah 11 kursi DPRD. Total jumlah suara 11 caleg Partai Demokrat yang menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung hanya sebesar 146.922 suara, jika dibandingkan dengan jumlah suara partai dan jumlah suara caleg yang tidak menjadi anggota DPRD yang sebesar 337.230 suara, hal ini menunjukkan serta menguatkan bahwa pelaksanaan pilgub dengan pileg yang bersamaan telah menjadi faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi kestabilan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014.

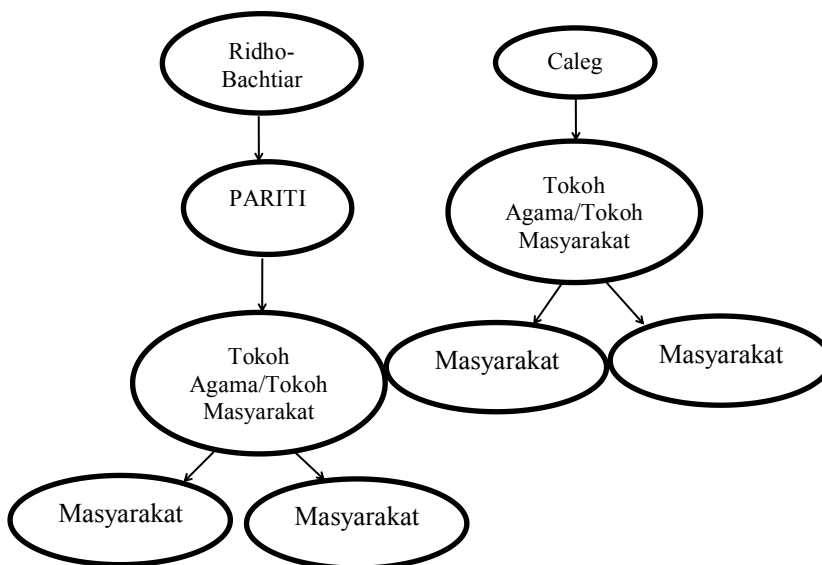
Strategi kampanye pasangan Ridho-Bachtiar menurut peneliti mencerminkan praktek patronase dan klientelisme politik dalam pemilu, sebagai bukti adanya acara menonton pertunjukan wayangan (menyasar kelompok Jawa) yang dilakukan oleh “Paguyuban Ridho Berbakti” (PARITI) yang merupakan tim sukses pasangan Ridho-Bachtiar dalam pilgub. Pelaksanaan acara nonton bareng wayangan

yang dilakukan oleh PARITI tersebut adalah merupakan bentuk patronase politik yang masuk dalam kategori pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), karena menonton wayangan sama saja dengan memberikan pelayanan berupa hiburan kepada masyarakat selain itu terdapat pula patronase dalam bentuk pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*) seperti pemberian sembako. Pemberian sembako tersebut juga dilakukan melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagai *broker* (klientelisme) guna mengefektifkan patronase yang telah diberikan.

Strategi kampanye yang cenderung mengarah pada praktek patronase dan klientelisme dilakukan pula oleh caleg dari Partai Demokrat. Hasil wawancara dengan Bapak Yandri Nazir dan Bapak M. Junaidi (Caleg Partai Demokrat). Strategi yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan perlombaan olah raga seperti lomba sepak bola, hal ini merupakan bentuk patronase pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), dalam melaksanakan perlombaan olah raga tersebut Bapak Yandri Nazir menggunakan jaringan *broker* (klientelisme) yaitu dengan carabekerjasama dengan ketua pemuda (karang taruna) pada setiap desa. Bentuk patronase yang lain adalah dengan melakukan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*), dengan cara mengusulkan pembangunan SMA dan penambahan tenaga kesehatan (dokter) di wilayah tertentu (dapil caleg yang bersangkutan). Bentuk patronase yang dilakukan oleh Bapak M. Junaidi yaitu pemberian-pemberian barang pribadi (*individual gifts*), korek api, sabun colek, barang-barang tersebut biasanya diberikan melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat di setiap desa yang

dikunjungi sebagai bagian jaringan *broker* (klientelisme). Patronase kedua yaitu adalah bentuk patronase yang memberikan pelayanan dan aktivitas (*services and activities*) dengan cara membawa artis (Kiki The Poters) sebagai bentuk memberikan layanan hiburan kepada masyarakat.

Gambar I.1
Pola Klientelisme Dalam Pilgub dan Pileg



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, tingkat Institusionalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung, berada dalam kategori sedang dengan nilai (1,19). Kedua, kestabilan perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi

Lampung tidak semata-mata dipengaruhi oleh institusionalisasi partai, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor lain yang lebih dominan yaitu: praktek patronase dan klientelisme dalam pilgub dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, hal itu dikarenakan tim sukses atau relawan dalam pilgub yang berasal dari luar Partai Demokrat secara tidak langsung turut serta mengkampanyekan Partai Demokrat dalam pileg, serta praktek patronase dan klientelisme yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat pada saat pileg.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah, DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung haruslah segera memperbaiki berbagai kekurangan dalam dimensi Institusionalisasi, terutama jumlah kekuatan anggota atau kader, jumlah jaringan ormas atau organisasi sayap partai, sehingga kedepan potensi dari kekuatan anggota atau kader dan ormas atau organisasi sayap partai, dapat berjalan maksimal sehingga mesin partai dapat berjalan lebih efektif pada saat pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. PolGov UGM. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika. Jakarta.
-

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

465

Basedau, Matthias and Stroh, Alexander. Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties, *GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems*. Number 69, February 2008.

Lisa, Ridvia. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman, Padang, Universitas Negeri Padang.